

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menghasilkan 93 sampel responden, namun yang dapat digunakan hanya 89 sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 0,258 (bernilai positif). Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat OPD memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.
2. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 dan koefisien 0,086 (bernilai positif). Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat OPD menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 dan koefisien 0,118 (bernilai positif). Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkualitas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki OPD Pemerintah Kota Pasuruan, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 0,203 (bernilai positif). Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang dijalankan OPD Pemerintah Kota Pasuruan, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji kembali pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal dengan subjek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R²* sebesar 0,853 atau sebesar 85,3%

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil dari pengujian sejalan dengan hipotesis pada penelitian ini yang membuktikan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang diberikan pada tahun 2018 dan 2019 kepada Pemerintah Kota Pasuruan. Hal tersebut disebabkan adanya masalah pada penatausahaan aset tetap dan persediaan yang belum tertib, penyajian saldo aset belum memadai, realisasi belanja daerah yang tidak memadai dan tidak digunakan secara tepat, penatausahaan persediaan yang belum tertib, dan kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal.

Selain itu, Pemerintah Kota Pasuruan juga tidak mampu mempertahankan konsistensi dalam memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Pasuruan didorong pada kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal sehingga diharapkan tidak terjadi ketidakkonsistenan Pemerintah Kota Pasuruan dalam memperoleh opini WTP kedepannya.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Menerapkan prinsip akuntansi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Pasuruan. LKPD yang disusun dan disajikan sesuai dengan SAP akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan LKPD yang tidak sesuai dengan SAP.
- b. Melaksanakan atau mengimplementasikan sistem akuntansi sesuai dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan mempengaruhi tingkat kualitas LKPD Pemerintah Kota Pasuruan. Semakin baik OPD menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Sumber daya manusia memiliki pengaruh dalam mengukur tingkat kualitas LKPD Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kompetensi yang dimiliki setiap pegawai bagian keuangan harus memiliki pengetahuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, keterampilan individu, dan sikap atau perilaku sebagai akuntan. Sehingga akan lebih baik jika setiap OPD Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi selalu memperhatikan tingkat kompetensi pegawai bagian keuangan.
- d. Sistem pengendalian internal di setiap OPD harus dijalankan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, agar para pegawai keuangan dapat bekerja dengan baik dan berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan akuntansi yang berlaku, sehingga LKPD yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam memperbaiki masalah-masalah yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terjadi dalam 4 sampai dengan 5 tahun ke belakang, serta sehubungan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan untuk memperoleh tingkat kualitas LKPD dengan opini WTP.

5.3. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pasuruan, maka terdapat beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kesulitan dalam pengumpulan data melalui media *google form* karena *link* yang digunakan untuk mengisi formulir tidak tersebar ke seluruh OPD Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga peneliti kembali melakukan penyebaran kuesioner fisik ke OPD Pemerintah Kota Pasuruan yang menghabiskan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

2. Setiap OPD Pemerintah Kota Pasuruan tidak memiliki jumlah pegawai bagian keuangan yang sama, sehingga peneliti tidak mengambil sampel secara merata di setiap OPD Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Peneliti tidak dapat melakukan pengambilan sampel di seluruh OPD Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga akan ada perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dapat mengambil sampel di seluruh OPD.

5.4. Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa agar memperhatikan media yang digunakan dalam menyebarkan kuesioner sehingga dapat mempersingkat penyebaran dan pengumpulan kuesioner, sebelum melakukan pengambilan data, peneliti sebaiknya mencari informasi mengenai jumlah rata-rata pegawai bagian keuangan setiap OPD agar dapat menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, dan untuk mengupayakan agar dapat mengambil sampel diseluruh OPD Kota/ Kabupaten/ Provinsi agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R., & Beasley, M. S. (2013). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu* (Adaptasi Indonesia). Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumanti, T. A. (2011). *Manajemen Investasi, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hall, J. A. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi* (Adaptasi Indonesia). Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto. (2002). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, S.S. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10 Juni 2002. Jakarta.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF E.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbari. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Mangkunegara, A. P. (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munawir, D. S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2014). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintah*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 *Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 17 Januari 2008. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.

Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory 7th Edition*. Pearson Education Limited.

Yadiati, Winwin, & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group.

